



Kabut Asap Pontianak Makin Pekat

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat makin oekat Rabu (16/9/2026). Kondisi ini membuat kasus gangguan pernapasan di Pontianak melonjak. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, hingga 9 September, lebih dari 12,5 juta orang di tujuh provinsi di Kalimantan dan Sumatra telah terpapar kabut asap. Tercatat kasus penyakit pernapasan terkait karhutla meningkat lebih dari dua kali lipat dari 50.891 kasus pada 1 September menjadi 113.336 kasus pada 9 September. Berita terkait baca hal.5. (ist.reuters)

TERSANGKA

ORANG KEPERCAYAAN NUSRON WAHID

- **Fahd A Rafiq**
Penampung akhir uang dari Arif.
- **Arif Sugiyanto**
Pengepul utama; menerima Rp1,8 M dari Erwin. Ada mutasi Rp10 M dan dugaan aliran Rp8 M bersama Lampri.
- **Erwin**
Perantara; menerima Rp1,5 M dari pihak Summarecon, meneruskan Rp200 Juta ke Sontang, serta menerima Rp2,1 M terkait HGB Bela Parahyangan.
- **Muhammad Fakhry**
Perantara; bersama Erwin diduga menyeterorkan uang kepada Arif.



MENCARI NUSRON DI TENGAH BADAI BPN

Dua hari absen di DPR setelah empat orang kepercayaannya tersangka suap HGB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dua hari berturut-turut tidak menghadiri rapat di DPR. Diketahui dia absen sejak Selasa (15/9/2026) hingga Rabu (16/9/2026). Ketidakhadiran Nusron terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Komisi anti-rasuah secara resmi juga telah menetapkan 8 tersangka, yang 4 diantaranya disebut sebagai orang dekat Nusron. Bahkan KPK menyorotinya sebagai struktur bayangan, yaitu pihak swasta atau pihak ketiga yang memiliki peran krusial sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN. Istilah 'shadow cashier' pun mencuat. Diketahui, jumlah uang yang diamankan KPK fantastis dan disebut sebagai yang paling besar dalam sejarah operasi senyap lembaga antirasuah. Total uang yang disita mencapai Rp 106,3 miliar. Terpisah, istana menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dalam penanganan kasus ini. Proses hukum, termasuk jika penyidikan KPK mengarah kepada Nusron Wahid, diserahkan kepada aparat penegak hukum. **BACA HAL 11...**

TERSANGKA LAIN

- **Adrianto Pitojo Adhi**
Pemberi utama. Diduga menyerahkan Rp1,5 miliar melalui Yaser dan Rizal pada 27 Agustus 2026.
- **Rizal Pahlevi**
Perantara Summarecon dalam penyerahan uang.
- **Yaser Alfari**
Perantara Summarecon bersama Rizal dalam penyerahan Rp1,5 miliar.
- **Lampri**
Diduga menerima aliran dana Rp8 miliar bersama Arif.

- **Sontang Coin Manurung**
Diduga menerima Rp200 juta sebagai fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

BUKTI

RP31,86 MILIAR + US\$2,6115 JUTA + SGD1,9745 JUTA + SAR910 + RM98
(ditemukan di rumah Arif di Cibubur).



Pernyataan tersebut merespons permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar pemerintah pusat menugaskan Danantara mendukung pengembangan jaringan transportasi massal Jakarta. Pramono menyebut pengembangan LRT selanjutnya diarahkan hingga Jakarta International Stadium (JIS), sekaligus mengaitkannya dengan pengembangan konektivitas menuju kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Bapak Presiden, akan lebih menggembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga untuk membantu kami, Pak,” kata Pramono dalam sambutannya.

Prabowo kemudian menyatakan Danantara perlu ikut mendukung pembangunan transportasi di Jakarta. “Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa,” kata Prabowo.

Permintaan tersebut muncul setelah pemerintah meresmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai yang memiliki panjang 12,2 kilometer dan 11 stasiun. Proyek ini dikerjakan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), BUMD milik Pemprov DKI, dengan menggunakan APBD. Nilai investasinya mencapai Rp12,1 triliun. Satu rangkaian kereta dapat mengangkut sekitar 270 penumpang dan jaringan tersebut diproyeksikan melayani hingga 80 ribu penumpang perhari.

Sebelumnya, Jakpro memproyeksikan penambahan jaringan hingga Manggarai akan meningkatkan jumlah pengguna LRT secara bertahap menjadi sekitar 60 ribu hingga 80 ribu penumpang per hari. Sebelum perpanjangan, LRT Jakarta yang melayani Kelapa Gading-Velodrome hanya mengangkut sekitar 3.500-4.000 penumpang perhari.

Pramono juga menyampaikan rencana memperpanjang jaringan LRT menuju Dukuh Atas. Pemerintah DKI sebelumnya menyatakan pengerjaan

PRABOWO WAJIBKAN DANANTARA BANTU PERLUASAN LRT JAKARTA

Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ikut membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan jaringan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta. Permintaan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan LRT rute Kelapa Gading-Manggarai di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9/2026).



Presiden Prabowo meresmikan operasional LRT rute Kepala Gading-Manggarai di Stasiun LRT Manggarai, Jakarta, Rabu (16/9/2026). (ant)

trase tersebut ditargetkan dimulai pada 2027 dan diharapkan selesai pada Agustus 2028.

Dalam peresmian tersebut, Prabowo juga menyinggung hubungan politiknya dengan Pramono. Prabowo mengatakan dirinya dan Pramono berasal dari partai berbeda dan pernah bersaing, tetapi tetap dapat bekerja sama setelah memperoleh mandat sebagai pejabat publik.

“Contoh yang paling baik daripada bernegara secara Indonesia, saya Presiden Republik Indonesia memimpin pemerintah pusat, Saudara Pramono Anung Gubernur DKI memimpin pemerintah daerah Jakarta. Kita datang dari partai yang berbeda, kita bersaing, tapi bisa bekerja sama,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, perbedaan politik tidak semestinya menghalangi

kerja pemerintahan karena jabatan publik merupakan mandat dari rakyat.

“Kita bisa saling menghormati karena kita sadar, di dalam hati, sanubari kita, bahwa kita dipilih oleh rakyat,” katanya.

Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya, Pramono, maupun Wakil Gubernur DKI Rano Karno memiliki posisi sebagai pelayan masyarakat.

“Saya di sini sebagai Presiden, Saudara Pramono Anung sebagai Gubernur, Saudara Rano Karno sebagai Wakil Gubernur, kita pelayan rakyat, kita petugasnya rakyat,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengatakan pejabat yang menerima mandat rakyat harus mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat. “Kalau kita tidak kuat, kita tidak sanggup, ya kita harus kesatria, kita harus minggir,” katanya.

“Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat,” lanjut Prabowo.

MRT Barat-Timur Groundbreaking 2026

Di tengah pembicaraan mengenai pengembangan transportasi massal, Pramono juga menargetkan pembangunan MRT Jakarta jalur Barat-Timur atau East-West Line mulai groundbreaking pada 2026. Jalur tersebut ditujukan untuk memperluas layanan MRT ke wilayah Jakarta Barat yang selama ini belum terjangkau jaringan MRT.

“Saya berharap bahwa MRT Barat-Timur ini bisa groundbreaking pada tahun ini oleh Bapak Presiden,” ujar Pramono.

Menurut Pramono, pembagian pembiayaan proyek MRT Barat-Timur telah dibicarakan dengan pemerintah pusat. Skema pendanaan tidak hanya dibebankan kepada Pemprov DKI.

“Kemarin kami sudah bicara mengenai sharing antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta,” kata Pramono. Ia berharap pembahasan mengenai pembiayaan tersebut segera rampung agar proyek dapat dimulai tahun ini. (gus,ist,ant/dya)

DISEBUT TAK TERSERAP, TRANSFER DAERAH DIPANGKAS

Presiden Prabowo Subianto menyoroti rendahnya penyerapan anggaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), yang dalam APBN 2026 memang mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Prabowo mengatakan pemerintah pusat perlu memastikan anggaran negara yang disalurkan ke daerah benar-benar digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Menurut dia, masih terdapat pemerintah daerah yang menyimpan

dana di perbankan atau menghadapi persoalan politik dengan DPRD sehingga anggaran yang telah ditransfer tidak segera dibelanjakan.

“Kadang-kadang aneh, uang oleh Pemda itu tidak digunakan. Kita ada bukti. Ditaruh di bank, ada macam-macam. Atau ada konflik antara bupati sama DPR. Antara gubernur sama DPR. Jadi uang sudah kita transfer, nggak dipakai,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (16/9/2026).

Menurut Prabowo, transfer anggaran dari pemerintah pusat semestinya mempercepat

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan menentukan prioritas belanja, tetapi penggunaan anggaran harus efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Presiden kemudian mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar di tingkat desa. Ia mempertanyakan mengapa sejumlah kebutuhan dasar seperti jembatan belum dibangun meski pemerintah telah menyalurkan dana ke desa selama bertahun-tahun.

“Ini desentralisasi sudah jalan berapa? 25 tahun ya. Dana sudah kita

turunkan ke tiap desa. Rp1 miliar. Selama 10 tahun terakhir. Transfer ke daerah sudah. Kenapa jembatan untuk di desa tidak pernah dibuat? Padahal jembatan itu hanya Rp400 juta,” ujar Prabowo.

Kebijakan tersebut berlangsung ketika alokasi TKD memang dipangkas cukup besar. Berdasarkan telaah ANTARA, total belanja TKD 2026 ditetapkan sekitar Rp692,99 triliun, turun 24,6 persen dari Rp919,8 triliun pada 2025. Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi salah satu komponen yang mengalami koreksi paling besar, sekitar 69,5 persen. (gus,ant/dya)

NEGARA PEMBERI UTANG TERBESAR RI

ULN Indonesia Juli 2026

- Total ULN: **US\$454,8 miliar**
- Setara sekitar **Rp8.046,3 triliun**
- Rasio ULN terhadap PDB: **30,7%**

5 Negara Kreditor Terbesar

- Singapura:
US\$51,269 miliar — ±Rp907 triliun
- Amerika Serikat:
US\$29,476 miliar — ±Rp521,5 triliun
- China:
US\$25,778 miliar — ±Rp456,1 triliun
- Jepang:
US\$20,495 miliar — ±Rp362,6 triliun
- Hong Kong:
US\$20,114 miliar — ±Rp355,9 triliun

Total utang kepada negara kreditor
US\$209,770 miliar
(sekitar **Rp3.712,1 triliun**)

Organisasi Internasional

- IBRD:
US\$21,223 miliar / ±Rp375,4 triliun
- ADB:
US\$12,307 miliar / ±Rp217,8 triliun
- IMF:
US\$8,757 miliar / ±Rp155 triliun

Total
US\$46,799 miliar
(Sekitar **Rp828,1 triliun**)



Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi menyampaikan sorotan itu saat membacakan Anggaran Pembangunan Daerah 2027 dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

"Ada satu angka yang paling menggugah kami, bunga utang tahun 2027 sebesar Rp650,31 triliun. Angka itu hampir menyamai seluruh transfer ke daerah yang Rp735 triliun," ujar Ahmad.

Dalam RAPBN 2027, total belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.362,2 triliun, sedangkan TKD dialokasikan Rp735 triliun. Pemerintah menyatakan belanja tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, energi, dan penguatan ekonomi daerah.

Ahmad mengatakan besarnya TKD

DPD PROTES BUNGA UTANG CAPAI RP650 T: SETARA TKD 38 PROVINSI

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti besarnya anggaran pembayaran bunga utang pemerintah dalam RAPBN 2027 yang mencapai Rp650,31 triliun. Nilai tersebut disebut hampir menyamai alokasi transfer ke daerah (TKD) yang tahun depan ditetapkan sebesar Rp735 triliun.



Menteri Keuangan Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melanjutkan rapat bersama DPD RI pada Rabu (16/9/2026). ist

tersebut harus dibagi untuk 38 provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota, serta lebih dari 75.000 desa/kelurahan. Karena itu, menurut dia, besaran transfer ke daerah perlu dilihat bersama dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan di daerah.

DPD juga menyoroti perubahan komposisi belanja pemerintah. Porsi TKD disebut terus menurun, dari 28,24 persen pada 2023 menjadi 17,94 persen dalam RAPBN 2027. Pada periode yang sama, porsi belanja pemerintah pusat meningkat dari 71,76 persen menjadi 82,06 persen.

Persoalan lain yang disoroti DPD adalah pemotongan belanja modal. Menurut Ahmad, kondisi itu membuat belanja infrastruktur berada pada level terendah dalam sekitar dua dekade terakhir.

Di sisi lain, daerah justru dituntut meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ahmad menyebut target PAD meningkat dari Rp264 triliun pada 2020 menjadi Rp429 triliun pada 2026.

"Daerah [otomatis] terdorong, bahkan terpaksa menaikkan berbagai pungutan di beberapa wilayah. Itu sudah menimbulkan keresahan dan kerawanan sosial," tutur Ahmad.

DPD juga mempersoalkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dalam RAPBN 2027. Pagu DBH disebut hanya Rp63 triliun, turun 62,5 persen dibandingkan realisasi 2025.

Menurut Ahmad, kondisi tersebut berpotensi menambah risiko fiskal daerah. Ia mengatakan penurunan penerimaan daerah tersebut bukan semata-mata karena berkurangnya kontribusi dari daerah kepada pemerintah pusat, tetapi juga berkaitan dengan perubahan mekanisme pembagian.

Sorotan tersebut menjadi penting karena pemerintah masih mengandalkan sumber daya alam sebagai salah satu basis penerimaan negara. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun secara keseluruhan. Pemerintah menyatakan optimalisasi PNBP antara lain dilakukan melalui peningkatan tata kelola sumber daya alam, produktivitas aset negara, dan hilirisasi.

Ahmad secara khusus menyoroti target PNBP sekitar Rp283 triliun yang berasal dari sumber daya alam di daerah, mulai dari minyak dan pertambangan hingga sumber daya perairan.

"Banyak perusahaan beroperasi di daerah, tetapi membayar pajaknya di kota besar, tempat kantor pusatnya di sana. Daerah menanggung jalan yang susah dan lingkungan terdampak, tapi pajaknya tercatat ditempat lain," kata dia.

Utang Terus Naik

Besarnya pembayaran bunga utang juga berlangsung ketika posisi utang luar negeri Indonesia meningkat. Data terbaru Bank Indonesia menunjukkan ULN Indonesia pada Juli 2026 mencapai US\$454,8 miliar, naik 4,9 persen secara tahunan, meski hanya meningkat tipis dari US\$454,5 miliar pada Juni. Rasio ULN terhadap PDB tercatat 30,7 persen.

ULN pemerintah pada periode tersebut mencapai US\$218,4 miliar atau tumbuh 3,2 persen secara tahunan. BI menyebut kenaikan tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Sementara ULN swasta mengalami kontraksi secara tahunan.

Struktur utang tersebut juga

membuat pengelolaan biaya pembiayaan menjadi perhatian. Data yang dikutip Bloomberg Technoz menunjukkan sekitar 67,1 persen ULN pemerintah atau US\$146,59 miliar berbentuk SBN, sedangkan pinjaman bilateral dan multilateral sekitar US\$71,8 miliar.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai struktur tersebut membuat pembiayaan pemerintah semakin terhubung dengan kondisi pasar keuangan global. Ia mengatakan porsi dolar AS yang masih sekitar 59,5 persen dari total ULN membuat Indonesia tetap sensitif terhadap pergerakan mata uang tersebut.

"Jadi dengan pangsa dolar sekitar 59,5%, lebih dari separuh kewajiban eksternal, Indonesia masih sensitif terhadap pergerakan dolar," kata Josua.

Di sisi tenor, ULN jangka panjang pada Juli 2026 mencapai US\$383,14 miliar, naik 2,65 persen secara tahunan. Sementara ULN jangka pendek turun 1,33 persen menjadi US\$71,62 miliar. Namun, sisa jatuh tempo utang luar negeri yang harus dibayar dalam satu tahun mencapai US\$96,38 miliar.

BI sendiri menilai struktur ULN Indonesia masih terjaga karena didominasi utang jangka panjang dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Bank sentral juga menyatakan pemerintah dan BI terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan menjaga risiko terhadap stabilitas ekonomi.

Pemerintah dan DPR sebelumnya menyepakati RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 5,8-6,5 persen. Asumsi yang digunakan antara lain inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat bunga SBN 10 tahun 6,5-7,3 persen. Dengan total belanja negara Rp4.097,2 triliun, pemerintah merancang defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Pemerintah menyebut RAPBN 2027 tetap diarahkan ekspansif, tetapi dengan penekanan pada kualitas belanja dan keberlanjutan fiskal.

Di sisi lain, Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman US\$650 juta atau sekitar Rp11,5 triliun untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal pemerintah pusat dan daerah. Pinjaman tersebut merupakan bagian dari subprogram pertama Accelerating Decentralization for Improved Local Governance (ADIL), yakni Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah. (tin,ktn,kcm/dya)

BPJS KESEHATAN TEKOR RP2 TRILIUN/BULAN

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menghadapi tekanan arus kas sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyebut selisih tersebut terjadi karena pembayaran pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun per bulan, sementara penerimaan iuran berada di kisaran Rp14 triliun.



(Ilustrasi) Peserta BPJS Kesehatan mengantre di Cikokol, Kota Tangerang, Banten. (ant)

JKN juga berkaitan dengan jumlah peserta tidak aktif, biaya pelayanan yang meningkat, inflasi medis, dominasi layanan rujukan tingkat lanjut, serta penggunaan layanan yang dinilai belum efisien. BPJS Kesehatan menyebut biaya pelayanan kesehatan meningkat dari Rp108,8 triliun menjadi Rp190,3 triliun pada 2019-2025, atau naik sekitar 75 persen.

Pada 2025, biaya penyakit katastropik disebut mencapai sekitar Rp50,2 triliun. BPJS Kesehatan juga menyatakan telah mencegah potensi inefisiensi pelayanan sekitar Rp6,5 triliun sepanjang tahun tersebut.

Iuran Tak Berubah Sejak 2020

Persoalan arus kas JKN juga berkaitan dengan penerimaan iuran. Prihati sebelumnya menyebut iuran relatif tidak berubah sejak 2020, sementara biaya pelayanan dan inflasi medis terus meningkat.

Inflasi medis atau medical trend di Indonesia disebut mencapai 16,9 persen, jauh di atas inflasi umum sekitar 2,5 persen. BPJS Kesehatan juga mencatat sekitar 52,9 juta peserta berstatus nonaktif, sedangkan sekitar 13 juta peserta memiliki tunggakan iuran.

Pada saat yang sama, cakupan JKN telah mencapai lebih dari 285 juta peserta, atau sekitar 98,8 persen populasi Indonesia. Data ini menunjukkan besarnya cakupan program sekaligus skala pembiayaan yang harus ditanggung sistem JKN.

(detikHealth)

Karena itu, BPJS Kesehatan tidak hanya mengandalkan tambahan anggaran pemerintah. Sejumlah strategi disiapkan, mulai dari memperluas kepesertaan, meningkatkan pengumpulan iuran, memperkuat quality and risk control, sampai memanfaatkan teknologi digital.

"Di samping yang kita lakukan tadi, peningkatan kepesertaan, peningkatan collecting iuran, quality and risk control, penerapan teknologi digital, semua proses bisnis di BPJS untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan," kata Prihati.

Pemerintah Siapkan Rp20 T

Persoalan pembiayaan JKN juga muncul dalam pembahasan anggaran kesehatan 2027. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan anggaran Kementerian Kesehatan pada 2027 ditetapkan Rp115,9 triliun, turun dari Rp128,6 triliun pada 2026.

Salah satu penyebabnya adalah perubahan mekanisme subsidi BPJS Kesehatan. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan total Rp20 triliun untuk subsidi BPJS Kesehatan, masing-masing Rp10 triliun melalui Kementerian Keuangan dan Rp10 triliun melalui Kementerian Kesehatan.

Budi menjelaskan Kemenkes memiliki keterbatasan berdasarkan ketentuan peraturan untuk menyalurkan dana tersebut kepada BPJS Kesehatan. Kementerian hanya

dapat menyalurkannya jika terdapat penambahan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau kenaikan tarif.

Dengan mekanisme tersebut, alokasi Rp10 triliun yang sebelumnya berada di Kemenkes pada 2026 akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan untuk 2027.

Menteri Kesehatan Budi sebelumnya juga mengatakan pencairan dana Rp20 triliun menjadi salah satu hal yang dibahasnya dengan Suahasil Nazara. Budi menyebut keterlambatan arus kas BPJS dapat berimbas pada pembayaran klaim kepada rumah sakit.

"BPJS kalau kekurangan dana, dia nanti bayar ke rumah sakit akan tertunda," kata Budi, Selasa (15/9/2026). Ia mengatakan mendapat laporan mengenai pembayaran klaim BPJS yang semakin panjang.

Budi berharap regulasi pencairan dana dapat segera diterbitkan. "Doakan kalau bisa bulan ini ya bagus," ujarnya.

Bagi BPJS Kesehatan, tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan program sembari melakukan pembenahan internal. Prihati mengatakan pengendalian biaya belum tentu langsung menghilangkan cash flow gap. Namun, langkah tersebut dapat memperpanjang kemampuan JKN mempertahankan pembayaran pelayanan. (tinist,rls,rri/dya)

Angka itu disampaikan Prihati dalam Media Workshop BPJS Kesehatan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (16/9/2026). Menurut dia, kondisi tersebut belum membuat BPJS Kesehatan menghentikan pembayaran kepada fasilitas kesehatan. "Itu kita berusaha dengan cash flow gap itu, kita jalan terus, tidak terjadi gagal bayar," kata Prihati.

Tekanan tersebut juga telah dibahas BPJS Kesehatan bersama pemerintah. Sehari sebelumnya, Prihati mengatakan lembaganya tengah menunggu penerbitan regulasi Kementerian Keuangan terkait dukungan dana Rp20 triliun. Pemerintah disebut telah menyiapkan dana tersebut untuk menjaga kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Prihati mengatakan BPJS Kesehatan akan melakukan advokasi langsung kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Surat permohonan pencairan dana juga telah disiapkan.

"Kita akan advokasi kepada Pak Menkeu. Surat sudah kita tulis untuk Pak Menkeu supaya yang Rp20 triliun bisa segera cair," ujar Prihati.

Kebutuhan terhadap tambahan dukungan itu menjadi lebih penting karena beban pelayanan kesehatan terus meningkat. Prihati menyebut BPJS Kesehatan melayani sekitar 2 juta transaksi kesehatan setiap hari, dengan nilai pembayaran sekitar Rp500 miliar per hari. Jika dihitung bulanan, pengeluaran pelayanan berada di sekitar Rp16 triliun. Di sisi lain, iuran yang terkumpul sekitar Rp14 triliun.

Beban Penyakit Jantung

Salah satu komponen besar dalam pembiayaan JKN adalah penyakit katastropik. Prihati memberi contoh pelayanan penyakit jantung.

Pada 2025, biaya pelayanan untuk penyakit jantung mencapai lebih dari Rp17 triliun. Hingga September 2026, pengeluaran untuk layanan jantung telah mencapai sekitar Rp10 triliun.

Prihati mengatakan pengendalian biaya diperlukan agar pertumbuhan pengeluaran tidak semakin memperlebar kesenjangan arus kas.

"Kalau kita berharap satu bulan satu triliun jantung ini, di akhir bulan nanti Rp16 triliun itu turun, very good, berarti ada pengendalian," kata dia.

Namun, pengendalian biaya tidak dimaksudkan untuk mengurangi hak peserta mendapatkan layanan kesehatan. BPJS Kesehatan, kata Prihati, tetap harus memastikan pasien memperoleh pelayanan sampai sembuh.

"Tetapi sekali lagi tidak boleh hanya menyatakan ini membatasi, tetapi ini menggeser volume base, pasien harus dilayani agar sembuh, tetapi dengan kesesuaian-kesesuaian yang menyebabkan pengeluaran itu efisien," ujarnya.

Dalam penjelasan BPJS Kesehatan yang dikutip sejumlah media pada September 2026, tekanan keuangan

PABRIK MEBEL KELUARGA JOKOWI DI SRAGEN TERBAKAR, **API PADAM SETELAH 1,5 JAM**

Pabrik mebel PT Rakabu Sejahtera di Dukuh Wonosari, Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, terbakar pada Selasa (15/9/2026) malam. Kebakaran terjadi di area mesin boiler atau oven pengering kayu dan diduga dipicu kebocoran pipa oli pada mesin oven pemanas kayu.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sragen Tommy Isharyanto mengatakan kebakaran diketahui sekitar pukul 20.00 WIB ketika seorang karyawan sedang bekerja. Saat itu, muncul titik api di area mesin boiler pengering kayu. Pekerja kemudian berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dan jaringan hidran internal pabrik.

"Api tiba-tiba muncul di area mesin boiler pengering kayu saat karyawan sedang bekerja. Awalnya, kobaran api terlihat kecil dipadamkan



Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kebakaran pabrik mebel di Dukuh Wonosari, Desa Sambirembe, Kecamatan Kalijambe, Sragen, Selasa (15/9/2026). Foto: Damkar Sragen

pakai APAR, dan jaringan hidran internal pabrik," kata Tommy, Rabu (16/9/2026).

Namun, upaya pemadaman mandiri tersebut berlangsung hampir dua jam dan tidak berhasil mengendalikan api. Kobaran justru semakin besar sehingga pengelola pabrik akhirnya meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Pengelola pabrik, Rohmad, menghubungi Damkar Sragen sekitar pukul 22.43 WIB.

"Sekitar pukul 22.43 WIB, pengelola pabrik akhirnya menghubungi petugas Damkar untuk memadamkan api. Kami langsung menerjunkan personel dan armada unit pemadam begitu mendapat laporan," ujar Tommy.

Damkar Sragen kemudian mengerahkan armada Double Cabin dan Unit 04 ke lokasi. Proses pemadaman sekaligus pendinginan berlangsung sekitar 1,5 jam. Petugas menggunakan sekitar 14.000 liter air

untuk mengatasi kebakaran dan mendinginkan perangkat oven yang terdampak api.

Tommy mengatakan api akhirnya dinyatakan padam sepenuhnya sekitar pukul 00.30 WIB. Kebakaran sempat memicu kepanikan di kalangan pekerja. Namun, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, kerusakan terutama terjadi pada mesin oven atau pengering kayu dan nilai kerugian materiil masih dihitung oleh pihak manajemen.

Berdasarkan pendataan awal petugas, kebakaran diduga berasal dari kebocoran pipa oli pada mesin oven pemanas kayu. Penyebab tersebut masih disebut sebagai dugaan berdasarkan pemeriksaan awal di lokasi.

PT Rakabu Sejahtera merupakan perusahaan manufaktur dan ekspor kayu/mebel yang berkaitan dengan bisnis keluarga Joko Widodo.

Bisnis mebel tersebut dirintis Jokowi pada 1988. Setelah Jokowi menjadi pejabat publik, pengelolaan perusahaan diserahkan kepada anggota keluarganya. Pabrik Rakabu di Sragen juga pernah mengalami kebakaran pada April 2016. (tin,kum,rri/dya)

MENHUT: TITIK KARHUTLA **SELALU NAIK DI AKHIR PEKAN**



Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan adanya tren kenaikan titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setiap akhir pekan. Pola tersebut terpantau terjadi pada Jumat, Sabtu, dan Minggu ketika Indonesia masih menghadapi kondisi

El Nino yang kuat.

"Dan ternyata mulai ada trennya itu. Trennya itu selalu naik kalau weekend, kalau akhir pekan. Hari Jumat, Sabtu, Minggu itu selalu naik," kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Karena itu, Raja Juli meminta

masyarakat, petani, maupun korporasi tidak melakukan pembakaran lahan, terutama dalam kondisi cuaca yang mendukung terjadinya kebakaran. Ia menilai pencegahan menjadi penting karena petugas masih harus berjibaku menangani karhutla di sejumlah wilayah.

"Jadi mohon diimbau kepada masyarakat perorangan, petani, maupun korporasi untuk tidak 'main api' di masa El Nino yang sangat kuat ini. Kasihan, betul-betul kasihan melihat Manggala Agni, TNI-Polri di lapangan yang betul-betul berjibaku," ujarnya.

Menurut Raja Juli, karhutla diperkirakan masih menjadi persoalan hingga Oktober atau awal November. Ia meminta masyarakat ikut mencegah munculnya titik api baru agar kerja pemadaman yang dilakukan pemerintah tidak berulang tanpa hasil.

"Seperti saya katakan tadi,

karhutla ini masih akan bersama kita sampai Oktober atau awal November. Kalau teman-teman turun ke lapangan, bisa melihat bagaimana Manggala Agni Kehutanan Kemenhut, TNI-Polri, BNPB, BPBD berjuang memadamkan api, kita betul-betul kasihan. Tapi setiap kali sudah padam, masih ada orang yang mau 'main api' untuk kembali membakar," kata Raja Juli.

Ia mencontohkan kondisi ketika petugas berhasil memadamkan kebakaran di satu lokasi, tetapi titik api kemudian muncul di tempat lain. Situasi tersebut, menurutnya, membuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi bagian penting dari pengendalian karhutla.

"Dan ketika mereka sukses memadamkan di satu titik, tahu-tahu sudah terbakar lagi di tempat yang lain. Kami terus tadi saya katakan penegakan hukum menjadi penting," ujarnya. (tin,ant,ist/dya)

Perubahan Alur Retribusi Parkir Kota Malang Uang Masuk Kas Daerah, Imbal Jasa Petugas hingga 70%

Ilustrasi: Petugas parkir Dishub Kota Malang menata kendaraan roda dua di sepanjang Jalan Tenes, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen. (Santi/Lentera)



MALANG- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Perparkiran mengubah mekanisme pengelolaan uang retribusi parkir di Kota Malang. Dalam aturan baru tersebut, uang tidak lagi langsung dibawa pulang petugas, tapi masuk ke kas daerah dulu. Kemudian baru diberikan kembali sebagai imbal jasa dengan besaran maksimal 70% untuk parkir tepi jalan umum.

"Seharusnya retribusi itu masuk dulu ke kas daerah, baru nanti akan diberikan ke petugas parkir, dikembalikan lagi sesuai dengan imbal jasa kesepakatan bersama," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, ditemui usai sosialisasi Perda Nomor 2 Tahun 2026, Rabu (16/9/2026).

Dikatakannya, perubahan tersebut menjadi salah satu poin signifikan dalam perda baru yang menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pria yang akrab dengan sapaan Jaya ini menjelaskan, melalui aturan baru, pengelolaan retribusi diarahkan agar mengikuti mekanisme penerimaan daerah terlebih dahulu. Setelah masuk ke kas daerah, sebagian penerimaan tersebut kemudian diberikan kepada petugas parkir

dalam bentuk imbal jasa.

Untuk parkir tepi jalan umum, besaran imbal jasa bagi petugas parkir ditetapkan maksimal 70 persen. Sementara untuk parkir khusus, besaran imbal jasa maksimal mencapai 60 persen. "Kalau untuk parkir khusus itu maksimal 60 persen untuk mereka. Sisanya baru masuk ke pendapatan asli daerah," kata Jaya.

Menurutnya, besaran tersebut nantinya masih akan disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan teknis yang berlaku. Dishub juga membuka kemungkinan agar pendapatan yang diterima masyarakat dari aktivitas parkir dapat lebih besar.

Selain mengatur mekanisme penerimaan dan imbal jasa, Perda Nomor 2 Tahun 2026 juga mengubah nomenklatur petugas di lapangan. Istilah "juru parkir" tidak lagi digunakan dan diganti menjadi "petugas parkir". Jaya menyebut, perubahan istilah ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan penyelenggaraan parkir yang lebih manusiawi.

Perda baru itu juga memuat ketentuan mengenai sanksi yang lebih tegas, baik bagi pengguna jasa parkir maupun petugas parkir. Namun, sejumlah aturan teknis masih

menunggu Peraturan Wali Kota (Perwal) yang saat ini dalam proses penyusunan.

"Ada yang bisa kami terapkan dengan adanya perda ini. Tetapi ada juga yang teknisnya diatur lebih rigid di perwal, mudah-mudahan tahun 2027 sudah terlaksana. Sekarang proses perwalnya sudah berlangsung," jelasnya.

Jaya menyebut saat ini terdapat sekitar 3.576 petugas parkir resmi di Kota Malang. Namun, sosialisasi perda baru untuk sementara menyasar sekitar 600 orang karena keterbatasan anggaran. Ia berharap petugas yang telah mengikuti sosialisasi dapat meneruskan informasi mengenai ketentuan baru tersebut kepada petugas parkir lainnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, perubahan regulasi tersebut diharapkan tidak hanya membuat pengelolaan retribusi parkir lebih tertata, tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap parkir ini nanti bisa tertata dengan baik, sehingga orang-orang yang akan datang juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas parkirnya," kata Wahyu. (Santi/Dya)

Masih Ada 8.000 Anak Stunting di Kabupaten Malang

MALANG - Stunting masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Hasil Bulan Timbang pada Februari 2026 mencatat sekitar 8.000 anak teridentifikasi mengalami stunting dari sekitar 147 ribu anak yang telah terdata.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memperkuat intervensi sejak hulu. Mulai dari pendampingan calon pengantin berisiko hingga penanganan kasus pada anak melalui keterlibatan dokter spesialis.

"Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melibatkan tim ahli untuk memberikan pendampingan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas. Pendampingan tersebut dilakukan melalui beberapa program. Pada program gizi, misalnya, dokter spesialis anak (Sp.A) dilibatkan untuk mendampingi Puskesmas dalam penanganan kasus stunting. Untuk yang pendampingan Sp.A kasus stunting itu sudah sejak 2025," ujar Petugas Seksi Kesehatan Keluarga, Bidang Kesehatan

Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, Rita Handayani, Rabu (16/9/2026).

Sementara dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), menurutnya, pendampingan tim ahli telah berjalan sejak 2022. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (Sp.OG) serta dokter spesialis anak juga dilibatkan dalam pendampingan terkait tata laksana pemeriksaan terintegrasi kesehatan ibu maupun deteksi dini kriteria kasus yang membutuhkan penanganan spesialis.

Dikatakannya, keberadaan tim ahli tersebut diharapkan membantu tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas dalam mengenali sekaligus menangani kasus secara lebih dini.

Intervensi juga diperluas hingga sebelum pasangan memasuki fase kehamilan. Pada 2026, Dinkes Kabupaten Malang mulai menjalankan kelas calon pengantin (catin) dengan pendampingan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.

Pendampingan tersebut menyasar calon pengantin yang memiliki faktor

risiko, seperti anemia dan kekurangan energi kronis (KEK), maupun kondisi lain yang membutuhkan perhatian lebih. Mereka diberikan kesempatan berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis.

"Untuk catin ini sudah berjalan di tahun ini. Itu bagi catin yang anemia, catin yang KEK, catin yang ada risiko-risiko, itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis," jelasnya.

Rita menilai, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan stunting sejak hulu. Sebab, kondisi kesehatan calon ibu dan calon pasangan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum memasuki masa kehamilan.

Di sisi lain, data Bulan Timbang juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang berhasil terdata. Pada 2025, sekitar



Ilustrasi: Pengukuran lingkaran kepala bayi pada pelaksanaan bulan timbang di Posyandu Sumbersekar, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. (foto: Prokopim Kab. Malang)

134 ribu anak tercatat mengikuti penimbangan. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 9.000 anak yang teridentifikasi stunting.

Sementara pada Februari 2026, jumlah anak yang terdata dalam Bulan Timbang meningkat menjadi sekitar 147 ribu anak, dengan temuan stunting sekitar 8.000 anak. (Santi/Dya)

SAUDI KLAIM CEGAT DRONE HOUTHİ DEKAT MAKKAH, KEAMANAN TANAH SUCI 'GARIS MERAH'

Arab Saudi meningkatkan kewaspadaan setelah sebuah drone yang disebut diluncurkan kelompok Houthi dari Yaman dicegat di sebelah selatan Makkah pada Selasa (15/9/2026) malam. Otoritas Saudi menyatakan drone itu dihancurkan sebelum memasuki wilayah udara terlarang kota suci.

Juru bicara Koalisi untuk Mendukung Pemerintah Yaman, Mayor Jenderal Turki al-Maliki, mengatakan drone tersebut dicegat sekitar pukul 18.50 waktu setempat. Pernyataan itu disampaikan pada Rabu (16/9/2026).

Menurut al-Maliki, kejadian tersebut merupakan upaya kedua yang oleh Saudi dikaitkan dengan usaha menargetkan Makkah. Upaya pertama, menurut versi Saudi, terjadi pada 27 Juli 2017 ketika sebuah rudal balistik diluncurkan ke arah kota tersebut.

Saudi kemudian menegaskan bahwa keselamatan dua masjid suci dan para jamaah merupakan batas yang tidak dapat ditoleransi.

"Keamanan Dua Masjid Suci dan para jemaah merupakan garis merah, dan Komando Pasukan Gabungan Koalisi tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan serta memberikan efek jera terhadap milisi teroris Houthi," kata al-Maliki dalam pernyataan yang dikutip media Saudi.

Al-Maliki juga menyebut upaya tersebut sebagai tindakan agresif yang berpotensi membahayakan jamaah, warga negara, dan penduduk di sekitar kawasan Makkah.

Houthi Membantah

Klaim Saudi tersebut langsung dibantah pihak Houthi. Hazem al-Assad, anggota biro politik Houthi, mengatakan tuduhan bahwa kelompoknya menargetkan Makkah merupakan klaim lama yang kembali digunakan Saudi.

"Klaim mengenai penargetan Makkah adalah kebohongan usang yang pernah digunakan sebelumnya dan tidak lagi dapat memperdaya siapa pun," tulis al-Assad melalui akun X, seperti dikutip AFP dan media internasional lainnya.

Dalam pernyataan lain yang dikutip SABA, sumber militer Houthi juga menyatakan pihaknya "dengan tegas membantah adanya ancaman apa pun dari Yaman terhadap kota suci Makkah maupun situs suci lainnya".

Insiden drone tersebut terjadi setelah Arab Saudi pada Selasa (15/9) mengeluarkan peringatan keamanan di sejumlah wilayah, termasuk Makkah, Jeddah, dan Taif.



Foto yang dirilis pada 15 September 2026 oleh Pusat Media Ansarullah Houthi ini dilaporkan memperlihatkan kendaraan militer yang terbakar setelah menjadi sasaran serangan mereka di wilayah al-Jawf, Arab Saudi. (AFP)

Saudi Arabia mengeklaim sistem pertahanan udaranya mencegat dan menghancurkan drone yang diluncurkan Houthi sebelum memasuki wilayah udara terlarang Makkah. Houthi membantah menargetkan kota suci tersebut. Perwakilan RI di Arab Saudi mengimbau warga negara Indonesia yang berada di kawasan tersebut meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti instruksi resmi pemerintah Saudi.

Peringatan di Makkah menjadi perhatian karena merupakan peringatan keamanan pertama di kota suci itu sejak eskalasi konflik terbaru. Peringatan tersebut kemudian dicabut dalam waktu singkat setelah tidak ada dampak yang dilaporkan.

Otoritas pertahanan sipil Saudi sebelumnya meminta masyarakat berada di dalam ruangan, menghindari area terbuka dan kerumunan, serta mengikuti instruksi pemerintah.

Peringatan itu muncul setelah serangkaian serangan Houthi ke wilayah Saudi. Koalisi pimpinan Riyadh menyatakan serangan rudal dan drone pada awal pekan melukai 13 warga sipil di wilayah Khamis Mushait, Abha, dan Taif.

Eskalasi tersebut menandai kembalinya intensitas konflik Saudi-Houthi setelah relatif mereda sejak gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2022.

Ketegangan tidak hanya terjadi di wilayah udara Saudi. Houthi dalam beberapa hari terakhir memperluas aktivitas militernya di pesisir Laut Merah Yaman dan kawasan strategis Bab el-Mandeb.

Bab el-Mandeb merupakan salah satu jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Perkembangan di kawasan tersebut menjadi semakin penting bagi Saudi karena gangguan di jalur lain, termasuk Selat Hormuz, telah membuat

rute ekspor minyak melalui Laut Merah semakin strategis.

Reuters melaporkan Houthi juga menguasai sejumlah titik strategis di pesisir Laut Merah. Pergerakan tersebut meningkatkan tekanan terhadap Saudi sekaligus menambah risiko terhadap jalur perdagangan energi internasional.

Saudi sebelumnya juga menghadapi gangguan terhadap infrastruktur energi. Serangan drone pada pekan lalu menyebabkan East-West Pipeline, jalur minyak sepanjang sekitar 1.200 kilometer yang menghubungkan wilayah produksi di timur dengan pelabuhan Yanbu di Laut Merah, mengalami kerusakan dan harus dihentikan sebagian.

Perkembangan ini juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Perwakilan RI di Arab Saudi mengimbau warga negara Indonesia

yang berada di kawasan tersebut meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti instruksi resmi pemerintah Saudi.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengatakan Perwakilan RI terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat.

"Perwakilan RI di Arab Saudi mengimbau WNI untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi resmi Arab Saudi," kata Heni.

Hingga Rabu (16/9), Kemlu menyatakan belum menerima laporan adanya WNI yang menjadi korban atau terdampak insiden tersebut. Perwakilan RI juga terus memantau perkembangan keamanan di Makkah, Jeddah, Taif, dan wilayah lain yang terdampak peringatan keamanan. (gus,ist,rtr,rls/dya)



Seorang petugas keamanan Saudi mengawasi jamaah haji di Masjidil Haram. (dok)

Benarkah Keracunan Makanan Bisa Bikin Hilang Ingatan? Ini Penjelasan Medisnya

Kasus seorang siswi berusia 16 tahun, FY, setelah mengalami keracunan dalam peristiwa yang melibatkan ratusan pelajar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memunculkan pertanyaan baru, apakah keracunan makanan bisa sampai mengganggu fungsi otak dan menyebabkan seseorang kehilangan ingatan?

Keracunan makanan umumnya dikenal melalui gejala seperti mual, muntah, diare, sakit perut dan demam. Namun, pada kondisi berat, dampaknya dapat meluas ke organ lain.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyebut sebagian penyakit akibat makanan dapat menimbulkan komplikasi serius, termasuk meningitis, kerusakan ginjal, hemolytic uremic syndrome (HUS), hingga kerusakan otak dan saraf. CDC juga memasukkan kejang dan kebingungan sebagai gejala yang dapat muncul pada infeksi tertentu, seperti listeriosis invasif.

Dokter umum sekaligus dokter PJK3, dr. Ferry Kusmalingga, menjelaskan bahwa secara medis hubungan antara keracunan berat dan gangguan sistem saraf memang memungkinkan. "Yang harus dipahami, kejang itu adalah bentuk manifestasi klinis. Sederhananya pasti ada yang menyebabkan kejang tersebut," kata Ferry.

Menurut Ferry, dokter perlu mencurigai gangguan pada otak atau sistem saraf ketika pasien mengalami perubahan fungsi neurologis yang tidak biasa. Tanda-tandanya dapat berupa penurunan kesadaran, kebingungan, disorientasi, perubahan perilaku drastis, delirium, hingga ketidakmampuan mengenali orang terdekat.

Gangguan ingatan yang baru muncul setelah seseorang mengalami sakit juga

perlu diperhatikan. Begitu pula gangguan bicara, kelemahan atau mati rasa pada satu sisi tubuh,

Bagaimana Bisa Memengaruhi Otak?

Salah satu mekanismenya dapat terjadi secara tidak langsung. Muntah dan diare berat membuat tubuh kehilangan banyak cairan. Bila tidak segera diganti, kondisi tersebut dapat menyebabkan dehidrasi dan volume darah turun. Tekanan darah kemudian dapat ikut menurun sehingga aliran darah ke otak berkurang.

"Misal nih pasiennya muntah, diare berat lalu dehidrasi, volume darah turun, tekanan darah turun, aliran darah ke otak berkurang, fungsi otak terganggu," jelas Ferry.

Otak sangat bergantung pada pasokan oksigen, glukosa dan aliran darah yang memadai. Gangguan pada salah satu komponen tersebut dapat memengaruhi fungsi otak.

CDC juga mengingatkan bahwa muntah atau diare yang menyebabkan dehidrasi merupakan salah satu alasan seseorang perlu mendapatkan pertolongan medis. Tanda dehidrasi antara lain jarang buang air kecil, mulut kering dan pusing ketika berdiri.

Selain dehidrasi, keracunan berat dapat disertai gangguan elektrolit. Kadar natrium yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, misalnya, dapat memicu kebingungan, kejang hingga penurunan kesadaran. Gula darah yang terlalu rendah atau hipoglikemia juga harus diwaspadai. Dalam kondisi berat dan berlangsung lama, hipoglikemia dapat menyebabkan

kejang, koma
b a h k a n
c e d e r a

otak. "Hipoglikemia bisa menyebabkan kejang, koma, bahkan cedera otak bila berat dan berkepanjangan," kata Ferry.

Sepsis Juga Ganggu Fungsi Otak

Keracunan akibat infeksi juga dapat berkembang menjadi infeksi sistemik atau sepsis. CDC mendefinisikan sepsis sebagai respons ekstrem tubuh terhadap infeksi yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan, kegagalan organ, bahkan kematian bila tidak ditangani dengan cepat. Infeksi yang berujung sepsis dapat bermula dari saluran pencernaan. Salah satu tanda yang dapat muncul adalah kebingungan atau disorientasi.

Ferry menjelaskan, pada kondisi sepsis dapat terjadi gangguan fungsi otak yang dikenal sebagai sepsis-associated encephalopathy. Kondisi tersebut dapat muncul akibat respons inflamasi sistemik dan gangguan mikrosirkulasi, meskipun infeksi tidak secara langsung menyerang otak.

Risiko dari E. coli dan HUS

Salah satu komplikasi yang perlu diperhatikan pada penyakit akibat makanan adalah hemolytic uremic syndrome atau HUS, terutama pada infeksi Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC).

HUS merupakan komplikasi serius yang dapat menyebabkan anemia, penurunan trombosit dan gangguan ginjal. Dalam kondisi tertentu, komplikasi ini juga dapat menimbulkan masalah neurologis.

CDC menyebut HUS dapat menyebabkan kerusakan ginjal, masalah kesehatan permanen bahkan kematian. Tanda yang perlu diwaspadai antara lain berkurangnya produksi urine, darah dalam urine, mudah memar, kelelahan berat dan penurunan kesadaran. (CDC)

Karena itu, pada pasien dengan keracunan berat, pemeriksaan tidak cukup hanya mencari bakteri penyebab gangguan pencernaan.

Tidak Berarti Otak Rusak Permanen

Pertanyaan penting berikutnya adalah apakah gangguan ingatan setelah keracunan akan menetap.

Ferry mengatakan seseorang memang dapat mengalami amnesia atau gangguan memori setelah episode keracunan berat. Risiko tersebut terutama berkaitan dengan kondisi seperti kekurangan oksigen, tekanan darah yang sangat rendah, kejang berkepanjangan, hipoglikemia atau gangguan metabolik berat.

"Jadi pasien bisa mengalami amnesia atau gangguan memori setelah episode keracunan berat, terutama bila sebelumnya mengalami hipoksia, hipotensi berat, kejang berkepanjangan, hipoglikemia, atau gangguan metabolik berat," ujarnya.

Namun, gangguan fungsi otak sementara tidak sama dengan kerusakan jaringan otak permanen.

(far,tir,ist/dya)



Benarkah Pohon Berjalan Pindah 20 Meter/Tahun? Ini Kata Sains



Bayangkan menemukan pohon di tengah hutan hujan yang tampak berdiri dengan puluhan "kaki". Konon, pohon tersebut bahkan bisa berjalan perlahan mencari tempat yang lebih terang.

Cerita semacam itu bukan sekadar kisah dalam film fantasi. Di hutan hujan tropis Amerika Tengah dan Selatan, terdapat palem yang memang dijuluki walking palm atau "pohon berjalan". Namanya *Socratea exorrhiza*.

Julukan tersebut muncul karena bentuk akarnya yang tidak biasa. Alih-alih seluruh sistem akar berada di bawah tanah, pohon ini memiliki akar tunjang atau stilt roots yang tumbuh dari bagian bawah batang dan mencuat ke atas permukaan tanah.

Namun, apakah pohon ini benar-benar bisa berpindah tempat?

Salah satu mitos yang beredar menyebut *Socratea exorrhiza* dapat berpindah hingga 20 meter dalam

setahun. Cerita tersebut menggambarkan pohon seolah-olah mampu menumbuhkan akar baru ke arah sumber cahaya, sementara akar lama di belakangnya mati. Dengan cara itu, batangnya disebut perlahan berpindah menuju lokasi yang lebih menguntungkan.

Cerita tersebut bahkan pernah disampaikan kepada wisatawan oleh pemandu lokal. Ada pula kesaksian yang dikutip lembaga nirlaba Nature and Culture International dari paleobiolog Peter Vrsansky yang mengaku pernah melihat fenomena pohon tersebut "bergerak" di Cagar Biosfer Sumaco, Ekuador.

Dalam versi cerita itu, ketika tanah di sekitar pohon terkikis, *Socratea exorrhiza* disebut mampu menumbuhkan akar baru pada bagian tanah yang lebih kokoh. Batangnya kemudian perlahan berubah posisi, sementara akar lama terangkat dan

akhirnya mati. Tetapi, penelitian ilmiah memberikan gambaran berbeda. Istilah "walking palm" telah lama muncul dalam literatur mengenai palem tropis. Penjelasan awalnya berkaitan dengan kemampuan tanaman muda menghadapi gangguan fisik di lingkungan hutan.

Dalam tulisan John H. Bodley dan Foley C. Benson pada 1980, misalnya, dijelaskan bahwa bibit *Socratea exorrhiza* yang tertimpa batang atau dahan pohon dapat mengembangkan akar baru di sisi lain sehingga tanaman mampu kembali menegakkan dirinya.

Kemampuan tersebut kemudian mudah ditafsirkan sebagai gerakan "berjalan". Bentuk akar yang menyerupai kaki semakin memperkuat kesan tersebut. Ditambah suasana hutan hujan yang gelap, lembap dan penuh vegetasi, cerita mengenai pohon yang perlahan berpindah tempat menjadi terdengar masuk akal.

Padahal, menumbuhkan akar baru tidak sama dengan memindahkan batang. Penelitian Gerardo Avalos dan koleganya yang diterbitkan di jurnal *Biotropica* pada 2005 meneliti struktur akar tunjang pada *Socratea exorrhiza* dan palem neotropis lainnya. Studi tersebut menunjukkan bahwa sistem akar tunjang memiliki fungsi struktural dan biologis, bukan mekanisme untuk membuat batang berjalan.

Apa Fungsi "Kaki" Pohon Ini?

Justru di sinilah keunikan *Socratea exorrhiza* sebenarnya. Akar tunjang memungkinkan palem

tersebut tumbuh tinggi tanpa harus memperbesar diameter batang dan mengembangkan sistem akar bawah tanah dalam proporsi yang sama.

Penelitian Goldsmith dan Zahawi menunjukkan bahwa jumlah akar, ukuran struktur akar, dan arsitektur akar tunjang berkaitan dengan kemampuan pohon melakukan pertumbuhan vertikal. Sistem tersebut membantu tanaman mempertahankan stabilitas mekanis ketika tumbuh semakin tinggi.

Strategi ini sangat berguna di hutan hujan tropis.

Di bawah kanopi hutan, cahaya menjadi sumber daya yang terbatas. Pohon-pohon harus berkompetisi untuk mendapatkan celah cahaya. *Socratea exorrhiza* dapat tumbuh cepat secara vertikal dan memanfaatkan celah cahaya tanpa harus terlebih dahulu membangun batang yang sangat tebal.

Peneliti menyimpulkan bahwa struktur akar tunjang tersebut kemungkinan membantu spesies ini mengeksplorasi light gaps atau celah cahaya dengan cepat.

Jadi, jika terlihat seperti memiliki "kaki", fungsi utamanya bukan untuk membawa pohon berjalan, melainkan membantu menopang tubuh, mempertahankan stabilitas, dan mendukung strategi pertumbuhan di lingkungan hutan tropis.

Mitos mengenai kemampuan *Socratea exorrhiza* berpindah 20 meter per tahun memang terdengar lebih menarik daripada penjelasan tentang arsitektur akar. Namun, fakta biologisnya tidak kalah mengagumkan. tumbuh tinggi sekaligus tetap stabil. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Sepatu Balet Tren Lagi, Gaya Feminin nan Nyaman

Sepatu balet atau ballet flat kembali mengambil tempat di tengah perputaran tren fesyen 2026. Modelnya yang sederhana, ringan, dan mudah dipadukan membuat alas kaki yang identik dengan penari balet ini kembali diminati setelah beberapa kali keluar-masuk siklus mode.

Sepatu memang bukan sekadar pelengkap busana. Sepasang sepatu dapat menjadi fashion statement, membentuk karakter penampilan, bahkan ikut memengaruhi rasa percaya diri pemakainya. Tak mengherankan jika ungkapan *good shoes will take you to good places* masih relevan dalam dunia fesyen.

Tahun ini, ballet flat shoes kembali muncul sebagai salah satu model yang banyak diperbincangkan. Vogue memasukkannya dalam daftar tren sepatu musim panas 2026 dan menyebut model ini sebagai salah satu alas kaki yang paling menonjol musim tersebut. Sejumlah figur publik seperti Zoë Kravitz, Kaia Gerber dan Jennifer Lawrence turut terlihat mengenakannya.



Dari panggung ke jalanan

Seperti namanya, ballet flat shoes terinspirasi dari sepatu yang digunakan penari balet. Modelnya pada dasarnya sederhana, dengan sol datar dan bentuk yang mengikuti khaki.

Namun, desainnya terus mengalami perubahan. Warna dan material semakin beragam, begitu pula siluetnya. Beberapa model bahkan diberi sedikit hak untuk memberikan kesan lebih feminin.

Pada 2026, perkembangan desain tersebut semakin terlihat. Sepatu balet tidak lagi hanya berupa model klasik berwarna hitam dengan ujung membulat. Ada versi berbahan satin, jaring atau mesh, kulit lembut, model berkerut, hingga sepatu dengan hiasan kristal.

Vogue mencatat *soft ballet flat* sebagai salah satu model yang menonjol pada 2026. Konstruksinya ringan, menggunakan material lembut seperti kulit dan suede, serta memiliki siluet rendah yang memberikan kesan seperti perpaduan antara sandal rumahan dan sepatu balet.

Ada pula model *high-vamp*, yakni sepatu dengan bagian atas yang menutup lebih banyak area punggung Khaki. Harper's Bazaar menyebut bentuk ini sebagai salah satu perkembangan penting dari siluet klasik ballet flat pada 2026.

Warna pun mulai bergerak dari pilihan klasik. Vogue mencatat warna cokelat menjadi salah satu versi yang menonjol pada musim semi 2026, dengan pilihan mulai dari karamel, cognac, espresso hingga cokelat gelap. Material suede juga menjadi salah satu pilihan yang banyak

digunakan. Kembalinya tren sepatu balet tidak terjadi begitu saja. Sejumlah rumah mode dan desainer ikut mengembangkan kembali bentuk klasik tersebut.

Hailey Bieber hingga Taylor Swift

Popularitas ballet flat juga terlihat dari pilihan sejumlah selebritas. Hailey Bieber, misalnya, pernah memadukan sepatu balerina dengan tas dan kacamata hitam, kemeja polo, rok mini serta kaus khaki putih.

Taylor Swift juga tampil menggunakan sepatu balerina di atas panggung dalam tur Eras pada 2023. Sementara Meghan Markle memilih sepatu balerina klasik Chanel dua warna ketika menghadiri hari keempat Invictus Games 2023. Sepatu tersebut dipadukan dengan blazer dan celana pendek.

Pada 2026, tren itu masih terlihat kuat. Vogue menyebut sepatu balet menjadi salah satu pilihan alas kaki yang menonjol di kalangan figur publik, termasuk Kaia Gerber, Lily-Rose Depp, Hailey Bieber dan Zoë Kravitz. Bahkan tren tersebut tidak lagi sepenuhnya identik dengan perempuan. Vogue mencatat sejumlah figur pria seperti Harry Styles dan Bad Bunny juga tampil menggunakan ballet flats, menunjukkan bahwa siluet tersebut mulai menembus batas tradisional fesyen gender.

Fleksibel untuk Semua Gaya

Salah satu alasan ballet flat terus kembali adalah kemudahannya untuk dipadukan. Sepasang sepatu ini dapat digunakan untuk tampilan formal, berjalan-jalan santai, bekerja, hingga sekadar menikmati

ti kopi bersama kolega. Modelnya yang rendah membuatnya relatif mudah dipadukan dengan celana panjang, rok, gaun maupun jeans.

Vogue juga menempatkan ballet flat sebagai sepatu yang dapat digunakan dalam berbagai kesempatan, dari pakaian kerja hingga gaya akhir pekan.

Pilihan desain yang semakin beragam membuat pemakai tidak harus terpaku pada bentuk klasik. Sepatu balet dengan Mary Jane strap, model mesh, ujung runcing, *high-vamp*, hingga versi berhiasan kristal memberikan karakter berbeda meski berasal dari siluet yang sama. Perjalanan sepatu balet ke dunia fesyen ternyata memiliki sejarah panjang.

Meski awalnya dirancang untuk penari, pengaruh sepatu balet terhadap fesyen mulai terlihat pada dekade 1930-an dan 1940-an. Patricia Mears, kurator pameran *Ballerina: Fashion's Modern Muse*, mengatakan,

"Balet telah lama berhubungan dengan mode. Kemunculan perancang busana dan kebangkitan perempuan dalam desain fesyen seperti Chanel, Schiaparelli, dan Dior kemudian membantu memosisikan citra balerina sebagai aspirasi dalam kreasi mereka."

Perang Dunia Kedua juga menjadi salah satu momen yang ikut mendorong popularitasnya. Saat itu tidak semua orang bisa memakai sepatu karena dijajah. (farist/dya)



Mencari Nusron di.....dari Hal 1

Nusron yang ditunggu-tunggu dalam rapat kerja Kementerian ATR/BPN dengan Komisi II DPR Rabu (16/9/2026) kembali tidak hadir. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan kembali mewakili Nusron.

Ossy mengatakan Nusron memiliki penugasan dan kegiatan yang telah terjadwal. "Artinya beliau memiliki penugasan dan kegiatan yang sudah terjadwal," kata Ossy di kompleks parlemen, Jakarta.

Ketika ditanya mengenai keberadaan Nusron, Ossy mengatakan perlu mengeceknya kepada Sekretariat Menteri. "Saya harus cek dengan Sekretariat Menteri, kalau seperti itu," ujar Ossy.

Ossy memastikan Nusron tidak sakit. Ia juga mengatakan komunikasi dengan Nusron tetap berlangsung. "Setiap hari kami terus berkomunikasi karena kan kementeriannya masih dipimpin oleh beliau," kata Ossy.

Disebutkan, Nusron Wahid memberikan arahan kepada jajaran kementeriannya setelah KPK menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan ATR/BPN.

Ossy Dermawan mengatakan, arahan Nusron ditindaklanjuti melalui langkah-langkah internal di kementerian. Langkah tersebut dilakukan untuk merespons perkembangan perkara yang disampaikan KPK.

"Kami di kementerian, atas saran Bapak Menteri, juga melakukan langkah-langkah internal dalam rangka menindaklanjuti apa perkembangan perkara yang disampaikan oleh KPK. Saya pikir terkait substansi perkara, saya tidak akan berkomentar banyak," ujarnya.

Ossy tidak menjelaskan secara rinci arahan yang diberikan Nusron kepada jajaran ATR/BPN. Ia mengatakan kementerian masih mendalami fakta-fakta yang disampaikan KPK dan menyiapkan langkah internal sesuai kewenangan kementerian.

Menurut Ossy, langkah tersebut diperlukan agar celah yang memungkinkan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan pertanahan dapat dicegah. Ia menyebut kementerian akan mendalami kembali mekanisme internal, termasuk terkait keberadaan pihak perantara dalam proses layanan pertanahan.

"Kalau ya tentunya sebenarnya kan sesuai protap dan juga SOP yang dilakukan kan tidak mengenal adanya pengepul-pengepul itu. Tapi kita akan

dalami lagi seperti apa langkah internalnya, seperti apa akan kami sampaikan," kata Ossy.

Nusron sebelumnya juga tidak menghadiri rapat Komisi II DPR pada Selasa, 15 September. Dalam dua rapat tersebut, Ossy menjadi pejabat yang mewakili Menteri ATR/BPN.

Ketidakhadiran Nusron berlangsung ketika KPK sedang mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. Sehari sebelumnya, KPK menyebut empat dari delapan tersangka merupakan orang yang diduga menjadi kepercayaan Nusron.

Keempatnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Terpisah, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan kemungkinan pemeriksaan terhadap Nusron bergantung pada kebutuhan penyidikan.

"Apakah nanti NW dipanggil? Ya, itu tergantung kebutuhan penyidikan ke depan," kata Taufik dalam keterangan KPK.

KPK juga menyatakan akan terus mengembangkan temuan penyidikan dari perkara tersebut.

Pada Rabu, KPK menyampaikan bahwa penyidik masih menelusuri aliran uang dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan layanan pertanahan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan menemukan pola hubungan antara pihak swasta dan pejabat di lingkungan ATR/BPN yang menurut KPK menyerupai dua bagan struktur.

"Artinya di situ kita melihat seolah ada dua bagan struktur di ATR/BPN. Ada bagan struktur organisasi yang resmi, ada juga bagan struktur yang seperti bayangan," kata Budi.

Budi menyebut salah satu pihak yang menjadi perhatian adalah Erwin. Menurut KPK, Erwin merupakan pihak swasta yang diduga menjadi orang kepercayaan Nusron dan memiliki akses kepada pejabat ATR/BPN.

Diketahui, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Senin, 14 September.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampir; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung; Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi; serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta.

Empat tersangka lainnya adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias

Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Empat nama terakhir disebut KPK sebagai pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Nusron.

Sementara itu, istana menyatakan Presiden Prabowo Subianto tidak akan ikut campur dalam penanganan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Proses hukum, termasuk jika penyidikan KPK mengarah kepada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Marsda (Purn) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan sikap itu sesuai dengan arahan Prabowo dalam menghadapi persoalan hukum yang melibatkan kementerian. "Pak Presiden pun selalu mengatakan bahwa kalau ada masalah hukum dan sebagainya, serahkan lah kepada APH," kata Bambang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Bambang juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan Nusron dalam perkara tersebut belum dapat disimpulkan. Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menyatakan akan menelusuri aliran uang dalam perkara dugaan suap HGB, termasuk kemungkinan keterkaitannya dengan pihak di tingkat kementerian. "Itu kan masih dugaan. Tunggu saja dari KPK," ujar Bambang.

9 HGB Summarecon

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan sembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Summarecon.

Sebagian tanah yang menjadi objek perkara disebut masih berkaitan dengan sengketa dengan pemilik atau ahli waris sebelumnya.

Para ahli waris kemudian menggugat penerbitan sembilan SHGB tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Dalam prosesnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor mengundang para ahli waris untuk mediasi. Para ahli waris kemudian mengajukan blokir terhadap SHGB Summarecon.

KPK menyebut gugatan para ahli waris di PTUN Bandung kemudian dicabut.

Setelah itu, terjadi komunikasi antara pihak Summarecon dan Erwin. KPK menyebut Erwin sebagai pihak yang diduga menjadi orang kepercayaan Nusron.

Menurut KPK, Yaser Alfari dan Rizal Pahlevi selaku pihak yang menjadi perantara Summarecon kemudian mendekati Erwin untuk membantu membuka blokir dan memproses pemecahan HGB.

Dalam komunikasi tersebut, KPK

menduga Sontang melalui Erwin meminta imbalan Rp2 miliar untuk membuka blokir sembilan SHGB.

Pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.

Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adhi melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan Rp1,5 miliar kepada Erwin.

Dari jumlah tersebut, Erwin diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang sebagai imbalan untuk membuka blokir dan memproses pemecahan HGB Summarecon.

KPK juga mengungkapkan adanya dugaan pemberian uang lain dari Summarecon kepada pihak ATR/BPN sebelum transaksi Rp1,5 miliar tersebut.

Budi Prasetyo mengatakan ada pemberian Rp300 juta pada Maret 2026 yang juga diduga berkaitan dengan proses pengurusan HGB di lahan yang dikelola Summarecon.

"Kami perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama, ya. Sebelumnya diduga sekitar bulan Maret ada pemberian uang sejumlah Rp300 juta," kata Budi.

KPK menyatakan pemberian Rp300 juta tersebut berbeda dengan Rp1,5 miliar yang diberikan kepada Erwin pada Agustus.

Selain perkara Summarecon, KPK menemukan dugaan penerimaan lain di lingkungan ATR/BPN. Salah satunya berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan PT Bela Parahyangan diduga memberikan "uang pengurusan" kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar.

Dari uang tersebut, Erwin diduga menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif Sugiyanto.

"Di antaranya, terkait proses pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT BPA, bahwa diduga PT BPA melakukan pemberian 'uang pengurusan' kepada ERW (Erwin) sejumlah Rp2,1 miliar. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, ERW menyetorkan Rp1,8 miliar kepada ARF (Arif Sugiyanto)," kata Taufik.

KPK menyebut Arif diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry terkait pengurusan layanan pertanahan di kantor pertanahan, kantor wilayah, maupun Kementerian ATR/BPN.

Uang tersebut kemudian diduga diserahkan kepada Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq. KPK menyebut Fahd diduga menjadi penampung uang yang dikumpulkan Arif. (wid,ist,kum,ant/dya)

ADA 'NAMA AJAIB' DI ROTASI ERA PURBAYA, SUAHASIL BAKAL EVALUASI

Perombakan pejabat Kementerian Keuangan pada masa Purbaya Yudhi Sadewa mulai dievaluasi setelah Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menemukan sejumlah nama yang disebutnya “ajaib” dalam daftar rotasi. Nama-nama tersebut diduga masuk tanpa mengikuti proses assessment dan talent management yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Bimo mengatakan temuan tersebut menjadi alasan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai meminta agar perombakan pejabat ditunda atau dibatalkan. Ia menilai masuknya pejabat yang tidak melalui mekanisme seleksi dapat menimbulkan persoalan dalam tata kelola internal.

“Ada beberapa yang nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo saat ditemui se usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026).

Menurut Bimo, persoalan tersebut bukan semata soal pergantian jabatan. Ia menyoroti dampaknya terhadap pegawai lain yang telah mengikuti tahapan seleksi untuk menduduki posisi tertentu.

“Sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” ujarnya.

Bimo tidak menyebut identitas pejabat yang masuk dalam kategori “nama ajaib” tersebut. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci bagaimana nama-nama itu bisa masuk dalam daftar rotasi.

Namun, Bimo memastikan pejabat yang tidak memenuhi persyaratan akan dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi sebelumnya. Sementara pejabat yang telah memenuhi ketentuan tetap menjalani rotasi.

“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Balik ke posisi awal?) iya,” kata Bimo.

Permintaan evaluasi itu kini berada di tangan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Pada Rabu (16/9), Suhasil mengatakan Kemenkeu masih mendiskusikan proses perombakan yang dilakukan sebelum dirinya menjabat.

“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ujar Suhasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Suhasil mengatakan dirinya masih menunggu rekomendasi dari seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu. Menurut dia, penunjukan pejabat memiliki jenjang dan proses yang harus diperhatikan.

“Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-



Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto.

teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya struktur pejabat yang dapat bekerja lintas unit eselon I. Menurut Suhasil, koordinasi antarsatuan kerja diperlukan untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.

“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik,” ujar Suhasil.

Ketika ditanya apakah rotasi era Purbaya bisa dibatalkan, Suhasil belum memberikan keputusan. Ia mengatakan pemerintah perlu memeriksa terlebih dahulu proses pelantikan dan dasar keputusan yang digunakan.

“Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan,” katanya.

Perombakan yang kini dipersiapkan dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9/2026), hanya beberapa hari sebelum dirinya digantikan Suhasil sebagai Menteri Keuangan.

Perombakan tersebut menasar ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berdasarkan laporan

Tirto, sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III masuk dalam perombakan tersebut.

Selain itu, rotasi mencakup Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, serta pejabat pada unit organisasi non-eselon.

Saat melantik pejabat pada 10 September, Purbaya menyebut perombakan bukan sekadar pergantian posisi. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari proses organisasi agar Kemenkeu dapat beradaptasi dan bekerja lebih baik.

“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian posisi atau perubahan tempat bekerja. Ini merupakan bagian dari proses organisasi untuk memastikan Kementerian Keuangan terus bergerak, beradaptasi, dan bekerja semakin baik,” ujar Purbaya.

Kemenkeu sendiri sebelumnya telah melakukan sejumlah rotasi pejabat pada masa Purbaya. Dalam pelantikan pejabat pada Maret 2026, misalnya, Kemenkeu mencatat 1.585 pejabat dilantik, termasuk 44 pejabat pimpinan tinggi pratama. Pemerintah saat itu menekankan bahwa pengisian jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi dan tata kelola fiskal.

Persoalan rotasi terbaru menjadi perhatian setelah Purbaya tidak lagi menjabat Menteri Keuangan. Presiden Prabowo Subianto melantik Suhasil sebagai Menkeu pada 14 September 2026, menggantikan Purbaya. Serah terima jabatan kemudian berlangsung di Kemenkeu pada 15 September.

Sehari setelah pelantikan, Suhasil mengatakan pihaknya akan melihat terlebih dahulu keputusan dan dasar

SEKTOR PERPAJAKAN

- Target APBN 2026: **Rp2.357,7 triliun**
- Realisasi (Per 31 Juli 2026): **Rp1.209,6 triliun**
- Persentase Capaian: **51,31%**
- Proyeksi Akhir Tahun (Outlook): **Rp2.257,9 triliun**
- Catatan Risiko:** Berpotensi mengalami kekurangan penerimaan (shortfall) sekitar Rp99,8 triliun.

SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI

- Target APBN 2026: **Rp336,0 triliun**
- Realisasi (Per 31 Juli 2026): **Rp182,6 triliun**
- Persentase Capaian: **54,30%**
- Proyeksi Akhir Tahun (Outlook): **Rp320,6 triliun**
- Catatan Risiko:** Berpotensi mengalami kekurangan penerimaan (shortfall) sekitar Rp15,4 triliun.



hukum yang digunakan dalam pelantikan pejabat pada pekan sebelumnya.

“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suhasil pada Senin (14/9).

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang perlu dihadapi Suhasil. Persoalan itu mencakup kredibilitas asumsi makro dan penerimaan negara, beban fiskal yang dijalankan di luar APBN, tekanan terhadap keuangan daerah, serta kualitas belanja negara. CORE menilai pernyataan Suhasil bahwa pergantian menteri merupakan kelanjutan, bukan perubahan, serta komitmennya menjaga defisit di bawah 3 persen PDB dapat memberikan kepastian arah bagi pasar. Namun, yang perlu dilihat adalah kebijakan apa yang benar-benar akan dilanjutkan.

“Jika yang dilanjutkan adalah disiplin anggaran dan keterbukaan, pasar akan cepat tenang. Sebaliknya, jika beban terus dipindahkan ke luar APBN dan ke daerah, utang yang tidak tercatat akan menumpuk dan biayanya makin mahal saat jatuh tempo,” tulis CORE Indonesia dalam siaran persnya. (tin,ist,kum/dya)